

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

##### **2.1.1. Kinerja Instansi Pemerintah**

Suatu instansi pemerintah dapat dinyatakan berhasil melakukan tugas serta fungsinya jika menyerap seratus persen anggaran pemerintah, meskipun dampaknya masih belum mencapai hasil yang maksimal. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan instansi pemerintah, semua aktivitas atau program harus bisa diukur kinerjanya. Menurut Bastian (2006), kinerja adalah pencapaian dari pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk melihat tujuan dan sasaran yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, untuk memperoleh tingkat kinerja yang diharapkan perlu membuat rencana kinerja yang berisikan pemaparan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah.

### **2.1.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Mewujudkan akuntabilitas merupakan tujuan utama dari sektor publik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Simbolon, 2006). Dengan demikian, setiap lembaga sektor publik dituntut untuk lebih mengutamakan pertanggungjawaban kepada masyarakat, bukan hanya kepada otoritas yang lebih tinggi. Sehingga tuntutan ini kemudian memerlukan laporan keuangan eksternal yang dapat menunjukkan kinerja lembaga tersebut.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi yang dilaksanakan dari berbagai komponen, seperti perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003). Akuntabilitas sangat erat dalam hal pencapaian hasil secara transparan kepada masyarakat, sehingga setiap instansi pemerintah secara periodik harus memberitahukan capaian tujuan dan sasaran pada pemangku kepentingan yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

### **2.1.3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) mempunyai peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* (Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003). LAKIP juga diberlakukan pada setiap dinas yang ada untuk dapat memajukan tugas pokok dan fungsi yang telah direncanakan, sehingga dapat mewujudkan kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pemerintah dituntut bertanggung jawab untuk memperlihatkan kinerja yang telah dicapai kepada masyarakat melalui akuntabilitas.

## **2.2. Kejelasan Sasaran Anggaran**

Pengelolaan yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan serta menciptakan akuntabilitas, maka diperlukan anggaran dalam pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata (Mardiasmo, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, anggaran pemerintah merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang aktivitas belanja pemerintah dan landasan dalam upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk suatu periode tertentu.

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga orang yang bertanggung jawab mengerti atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Safitri, 2020). Dengan demikian, anggaran yang sudah jelas dan spesifik akan mempermudah tanggung jawab atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

### **2.3. Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah sistem dan langkah yang otomatis dapat saling memeriksa oleh bagian atau fungsi lain dalam suatu usaha. Pengendalian internal mencakup struktur organisasi dan cara serta alat yang dikoordinasikan dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan, memeriksa kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi, dan menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan (Damayanti, 2017).

Menurut COSO, pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan staf lainnya yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan yang memadai dalam mencapai tujuan pada kategori berikut, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Dalam menerapkan pengendalian internal, diharapkan dapat mengurangi tindakan yang dapat merugikan perusahaan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah seluruh tindakan yang secara terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan kepercayaan memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdiri atas komponen atau unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian internal

#### **2.4. Sistem Pelaporan**

Sistem pelaporan merupakan kewajiban pertanggungjawaban untuk memberitahukan kinerja semua kegiatan dan sumber daya, beserta posisi keuangan instansi tersebut (Aprilianti, dkk, 2020). Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang dapat digunakan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sistem pelaporan yang baik adalah sistem pelaporan yang telah ditata secara jujur, objektif dan transparan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Safitri, 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, instansi pemerintah harus menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan.

## 2. Neraca

Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dan menyajikannya secara komparatif dengan periode sebelumnya.

## 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi naik atau turunnya saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang meningkatkan ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

## 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjelaskan rincian dari angka yang tertulis dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca, yang mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan entitas pelaporan dan informasi lain yang diungkap dalam Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar.

## 2.5. Kerangka Konseptual

### 2.5.1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* dibangun atas sifat manusia yang mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Teori *stewardship* merupakan situasi dimana para manajer lebih

termotivasi pada tujuan organisasi daripada tujuan individu (Faizal dan Yaya, 2018). Teori *stewardship* melihat bahwa manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan baik demi kepentingan publik. Oleh karena itu, teori *stewardship* mengasumsikan hubungan kuat antara keberhasilan dan kepuasan publik, karena manajer akan bertindak untuk kepentingan bersama dan jika kepentingan tersebut tidak mempunyai tujuan yang sama, maka manajer akan berusaha agar kepentingan tersebut dapat mempunyai tujuan yang sama.

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah *steward* sebagai pengelola anggaran diharapkan dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan publik dan instansi terkait. Dengan begitu, pemerintah dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melakukan tugas dan fungsinya, merencanakan dan melaksanakan anggaran, bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik, serta menghasilkan laporan keuangan secara wajar.

### **2.5.2. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas**

#### **Kinerja Instansi Pemerintah**

Penyusunan anggaran yang dilaksanakan pemerintah sering sekali terjadi konflik, sehingga banyak program yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan (Manullang dan Abdullah, 2019). Konflik dalam penyusunan anggaran dapat memperburuk kinerja pemerintah, sehingga memerlukan pembentukan sasaran anggaran yang jelas dan dipertanggungjawabkan dalam periode tertentu.

Kejelasan sasaran anggaran memiliki dampak positif yang dapat menimbulkan tingkat kepuasan terhadap karyawan atas pencapaian yang diraih. Dengan demikian, penyusunan dalam akuntabilitas kinerja terbentuk dalam rencana strategi yang dibuat pemerintah, sehingga indikator tersebut dapat dibandingkan pada realisasi yang dihasilkan dan membentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

### **2.5.3. Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

#### **Instansi Pemerintah**

Pengendalian internal pada Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Internal merupakan pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas untuk mencapai tujuan kegiatan instansi pemerintahan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi sesuai ukuran, kompleksitas dan sifat serta fungsi instansi pemerintah (Fitrawati, dkk, 2017).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik akan mampu mewujudkan seluruh kegiatan dengan baik pula, sehingga akan memberikan kepercayaan pada organisasi jika kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik.

#### **2.5.4. Hubungan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem pelaporan yang baik dibutuhkan untuk menyampaikan dan melaporkan informasi secara akuntabel dan transparan untuk pengambilan keputusan dalam suatu periode (Yulianto, 2019). Pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik wajib menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010). Untuk itu, agar meringankan kinerja manajer dalam implementasi anggaran yang ditetapkan, maka dibutuhkan sistem pelaporan yang baik.

Jadi, jika sistem pelaporan yang baik dilaksanakan dengan jujur, objektif, dan transparan dalam menyusun serta melaporkan segala aktivitas pada publik, maka akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **2.6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan sebagai variabel independen serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Suhaesti (2016) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)” dengan sampel yang terlibat yaitu 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis

regresi berganda. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Fitriwati, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan survey. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Parigi Moutong).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yulianto (2019) yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati” dengan menyebarkan sampel kepada 31 SKPD yang dibagikan kepada kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian keuangan. Teknik analisis hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran

Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Teknik analisis hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif, dan Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Aprilianti, dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan”. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan survei. Teknik analisis hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan.

### 2.6.1. Tabel Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1.**

#### **Hasil Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	VARIABEL	OBJEK	HASIL
1	Suhaesti (2016)	Variabel independen: <b>X<sub>1</sub></b> : Kejelasan Sasaran Anggaran <b>X<sub>2</sub></b> : Sistem Pelaporan  Variabel dependen:	Kabupaten Bengkalis	Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

		<b>Y:</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
2	Fitrawati, dkk (2017)	Variabel independen: <b>X<sub>1</sub>:</b> Kejelasan Sasaran Anggaran <b>X<sub>2</sub>:</b> Sistem Pengendalian Internal  Variabel dependen: <b>Y:</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kabupaten Parigi Moutong	Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3	Yulianto (2019)	Variabel independen: <b>X<sub>1</sub>:</b> Kejelasan Sasaran Anggaran <b>X<sub>2</sub>:</b> Sistem Pelaporan  Variabel dependen: <b>Y:</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kabupaten Pati	Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4	Pratama, dkk (2019)	Variabel independen: <b>X<sub>1</sub>:</b> Sistem Pelaporan <b>X<sub>2</sub>:</b> Kejelasan Sasaran Anggaran  Variabel dependen: <b>Y:</b> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kabupaten Padang Pariaman	Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5	Aprilianti, dkk	Variabel independen:	Kecamatan Wilayah	Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh

	(2020)	<p><b>X<sub>1</sub></b>: Kejelasan Sasaran Anggaran</p> <p><b>X<sub>2</sub></b>: Pengendalian Internal</p> <p><b>X<sub>3</sub></b>: Sistem Pelaporan</p> <p>Variabel dependen:</p> <p><b>Y</b>: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Jakarta Selatan	<p>negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>
--	--------	---	-----------------	---

*Sumber: Penelitian Terdahulu*

## 2.7. Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah dalam menyusun target anggaran, sehingga akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk melihat sasaran kinerja, sasaran anggaran yang jelas menjadi salah satu tolak ukur dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi Kejelasan Sasaran Anggaran, akan mampu meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Variabel ini telah digunakan oleh peneliti terdahulu, yaitu Suhaesti (2016), Fitrawati, dkk (2017), Yulianto (2019) yang menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran menyatakan bahwa kejelasan sasaran

anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Pratama, dkk (2019) dan Aprilianti, dkk (2020), bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran dipandang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang disebabkan karena adanya kecenderungan menyerahkan AKIP kepada orang yang membidangi, dan kurangnya keterlibatan langsung dalam proses akuntabilitas kinerja.

Dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa jika realisasi anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka kinerja instansi dapat dikatakan baik dan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi, kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

HA<sub>1</sub>: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Batam.

### **2.7.2. Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengendalian internal yang efektif akan mampu menciptakan seluruh proses dengan baik, sehingga akan terciptanya efisiensi terhadap penggunaan sumber daya (Manullang dan Abdullah, 2019). Pengendalian internal meliputi semua

metode dan ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu instansi untuk menjaga harta miliknya, memeriksa keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan (Perwirasari, 2016). Pada sistem pemerintahan, instansi pemerintah melaksanakan sistem pengendalian internal yang mana menjadi kewajiban dan ketaatan instansi atas kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Jadi, jika pengendalian internal diterapkan dengan memadai, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Variabel ini telah digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu, Fitrawati, dkk (2017), dan Aprilianti, dkk (2020), yang menggunakan variabel Pengendalian Internal menyatakan bahwa Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

HA<sub>2</sub>: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Batam.

### **2.7.3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem pelaporan harus dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Semakin jujur, objektif, dan transparan dalam penyusunan laporan keuangan, serta melaporkan semua kegiatan kepada publik, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Suhaesti (2016), Yulianto (2019), Pratama, dkk (2019), dan Aprilianti (2020), menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang baik, diperlukan untuk menyampaikan dan melaporkan informasi secara akuntabel dan transparan untuk mengambil keputusan dalam suatu periode. Sehingga menyatakan bahwa jika sistem pelaporan meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**HA<sub>3</sub>: Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Batam.**